

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Deklarasi Djuanda tahun 1957 melahirkan konsep wawasan nusantara tentang negara kepulauan Indonesia. Adanya deklarasi tersebut menegaskan wilayah kedaulatan NKRI yang terdiri atas pulau – pulau dengan laut sebagai penghubungnya (*archipelagic state*). Sebanyak 3/4 wilayah NKRI berupa laut, sebagian lagi berupa daratan yang terbagi atas pulau besar dan kecil yang mencapai 17.508 dengan bentangan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer. Selain itu, perairan kepulauan teritorial seluas 3,1 juta kilometer persegi dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) seluas 2,7 juta kilometer persegi berada dalam kedaulatan perairan Indonesia. Kepulauan Indonesia juga terletak di titik pertemuan jalur komunikasi dunia antara Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta antara Benua Asia dan Benua Australia yang menghubungkan kepentingan negara-negara di barat dan timur, utara dan selatan. Fakta tersebut menunjukkan bahwa letak geografis dan geopolitik Indonesia di titik silang perdagangan dunia dan prospek pembangunan di bidang kemaritiman Indonesia menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang sangat strategis.

Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 menjadi dasar tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005–2025. Dalam isinya disebutkan bahwa salah satu arah pembangunan nasional adalah mewujudkan negara kepulauan yang mandiri, maju dan kuat berbasis kepentingan nasional dengan cara melakukan pembangunan berorientasi kelautan. Pembangunan di bidang kelautan merupakan pengembangan industri kelautan secara sinergi dan

berkelanjutan yang meliputi perikanan, industri maritim, energi & sumber daya mineral, pariwisata bahari, transportasi laut, bangunan kelautan dan jasa-jasa kelautan. Pengklasifikasian dari sektor tersebut didasari bahwa potensi sumberdaya kelautan cukup besar karena 75% wilayah NKRI terdiri atas lautan dan telah memberikan sumbangsih berarti bagi keberhasilan pembangunan nasional. Sumbangan tersebut antara lain berupa penyediaan kebutuhan dasar, peningkatan pendapatan masyarakat, perolehan devisa serta pembangunan daerah. Dengan potensi kelautan yang dimiliki, Indonesia sesungguhnya memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif untuk menjadi sektor unggulan dalam pembangunan nasional (Kusumastanto,2001).

Tabel 1.1
Kontribusi Sektor Kelautan Tahun 2001 - 2005 di Indonesia

No	Sektor Kelautan	Prosentase (%) PDB				
		2001	2002	2003	2004	2005
1	Perikanan	2,43	2,56	2,59	2,66	2,79
2	Energi dan Sumberdaya Mineral	9,29	9,32	9,36	9,38	9,13
3	Industri Maritim					
	• Pengilangan Minyak Bumi	2,09	2	2,01	2,05	2,10
	• LNG	1,2	1,11	1,13	1,12	1,14
	• Industri Maritim Lainnya	0,51	0,7	0,71	0,51	0,53
4	Perhubungan Laut	0,74	1,39	1,67	1,49	1,48
5	Wisata Bahari	1,47	1,56	1,52	1,51	1,52
6	Bangunan Kelautan	0,96	0,96	0,5	0,77	1,01
7	Jasa Kelautan	1,46	1,2	1,28	1,34	1,32
	Jumlah PDB Sektor Kelautan	20,15	20,71	20,77	20,83	22,42

Sumber : PKSPL-IPB 2006

Tabel (1.1) memuat kontribusi yang diciptakan oleh sektor – sektor kelautan terhadap perekonomian nasional. Sepanjang tahun 2001 hingga 2005 rata-rata PDB dari sektor kelautan yang tercipta sebesar 20,97%. Sektor ESDM menyumbang nilai paling besar diantara sektor yang lain, yaitu dengan rata-rata

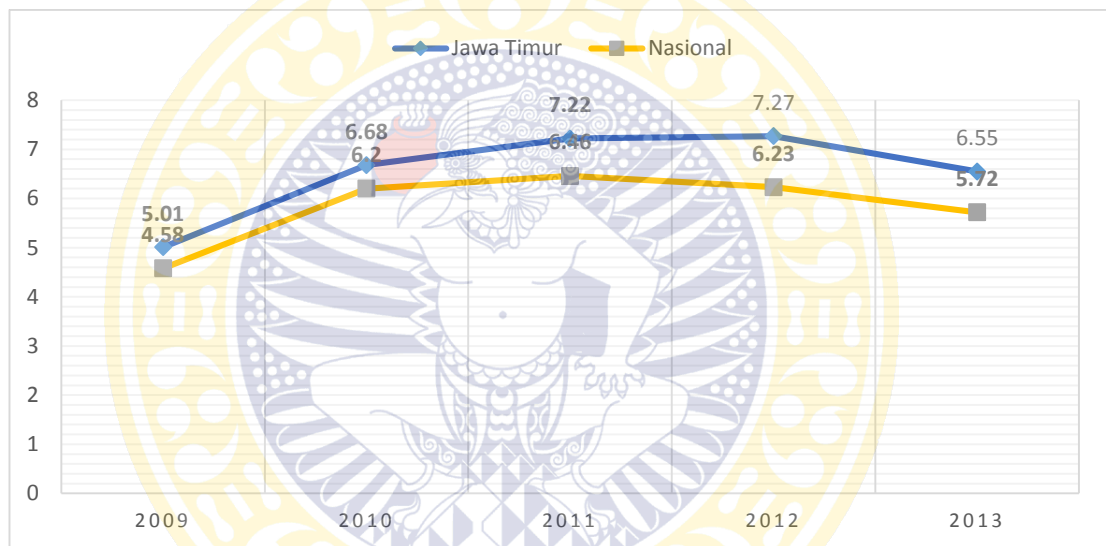
kontribusi sebesar 9% per tahun. prosentase rata – rata sebesar 9% per tahun. Meningkatnya laju perekonomian menjadi salah satu faktor meningkatnya kebutuhan terhadap energi sebagai *main resource* dalam pembangunan nasional. Sektor bangunan atau infrastruktur kelautan merupakan sektor yang paling rendah kontribusinya dengan sumbangan hanya sebesar 0,84% per tahun.

Paradigma pembangunan di masa lalu yang sentralistik dan hanya menitikberatkan pada pengembangan sektor–sektor yang berpotensi besar dalam kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi pada umumnya berlokasi di kawasan darat dan perkotaan. Wilayah pesisir dan laut belum menjadi prioritas utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Kondisi demikian mendorong timbulnya disparitas antar daerah karena sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya kelautan yang melimpah.

Visi pemerintah tentang mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat diterjemahkan melalui strategi pembangunan yang terintegrasi hingga ke daerah. Pembangunan di daerah menjadi tupoksi para kepala daerah, pelaku usaha terkait serta masyarakat di daerah. Sesuai dengan amanat Undang–Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan serta dapat menggali sumber–sumber pendapatan daerahnya sendiri. Arah pembangunan daerah sesuai UU otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah sebagai pionir untuk mensejahterakan masyarakat. Daerah juga memiliki kewenangan atas wilayah laut sebesar 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan kewenangan mengelola wilayah laut beserta kekayaannya.

Atas dasar tersebut, diperlukan penelitian tentang pembangunan terutama pengembangan potensi dan sumberdaya bidang kelautan di daerah.

Provinsi Jawa Timur adalah salah satu daerah dengan kemajuan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun belakangan. Keberhasilan Jawa Timur untuk mengelola sektor-sektor strategis berimbas pada kondisi ekonomi yang semakin membaik bahkan mampu mendongkrak pertumbuhannya ke level yang lebih tinggi.

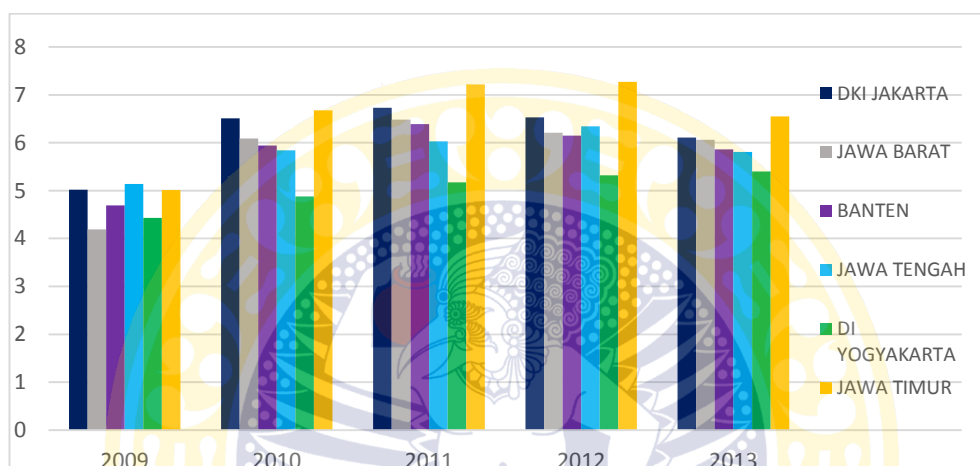


Sumber : Badan Pusat Statistik 2014

Gambar 1.1
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Terhadap Pertumbuhan Nasional
Tahun 2009 – 2013

Sejak tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur melesat hingga mencapai *peak* nya tahun 2011 dan 2012 yang mencapai angka lebih dari 7%. Dengan rata – rata pertumbuhan sebesar 6,5% per tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Timur mampu mengungguli pertumbuhan nasional yang rata-rata hanya tumbuh sebesar 5,8% selama 5 tahun. Di periode yang sama, pertumbuhan perekonomian Jawa Timur pun masih tergolong paling tinggi apabila dibandingkan

dengan provinsi lain di pulau Jawa. Pencapaian ekonomi Jawa Timur bahkan melebihi provinsi ibukota negara, DKI Jakarta di peringkat kedua dengan angka pertumbuhan rata-rata 6,1% diikuti Jawa Tengah dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 5,8% per tahun. Sementara itu, angka pertumbuhan DI Yogyakarta menjadi yang terendah dengan pertumbuhan 5,2% per tahun.



Sumber : Badan Pusat Statistik 2014

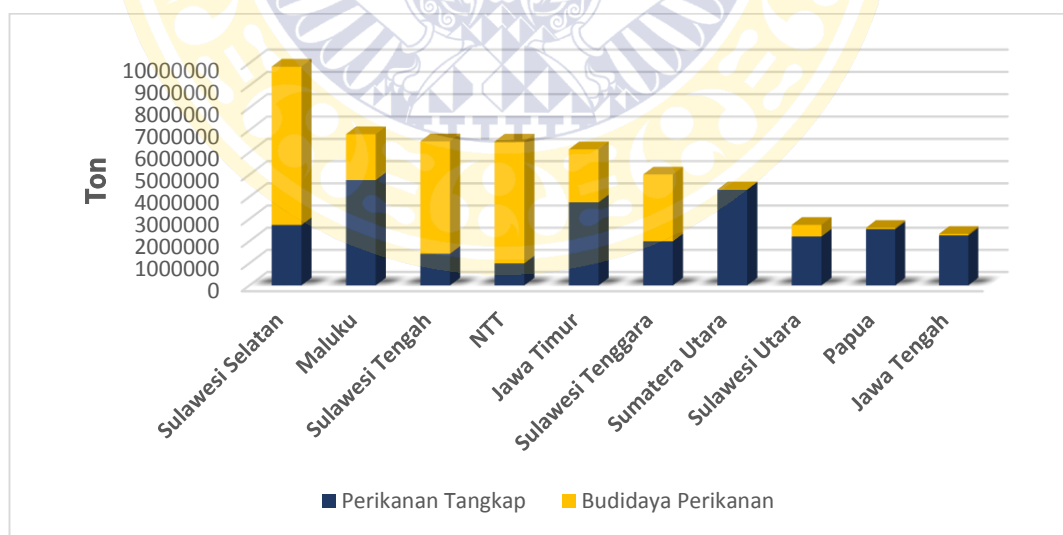
Gambar 1.2
Pertumbuhan Ekonomi Di Pulau Jawa Menurut Provinsi
Tahun 2009-2013 (%)

Meningkatnya nilai komoditas ekspor, stabilitas ekonomi dan perbaikan infrastruktur menjadi salah satu penyebab tumbuhnya perekonomian Jawa Timur (BKPM Jatim, 2012). Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator penting dalam melakukan analisis pembangunan suatu wilayah. Dapat dipahami bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi selalu linier dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat (Sukirno, 2010:10). Jadi, pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian.

Letak geografis Jawa Timur yang strategis juga menjadikan provinsi ini sebagai salah satu sentra lokasi kegiatan ekonomi yang menghubungkan Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Disamping itu,

panjang pantai yang membentang sepanjang perairan Jawa Timur sekitar 2.128 km dimana mencakup 2,5% wilayah laut nasional. Sepanjang pantainya dapat kita temukan beragam sumberdaya alam, sumberdaya mineral hingga kawasan pantai berpasir putih yang dapat dikembangkan menjadi obyek wisata. Pesisir dan laut Jawa Timur yang luas menyediakan potensi yang besar terutama pada hasil perikanan, bahan-bahan mineral, cadangan minyak dan gas bumi, serta objek pariwisatanya yang cukup menawan (P3GL, 2010).

Jawa Timur juga menjadi salah satu pusat industrialisasi perikanan di Indonesia. Statistik mencatat sejak satu dekade terakhir produksi perikanan Jawa Timur mampu mencapai 6 juta ton dan menyumbang 15% dari total produksi ikan nasional (BPS, 2013). Meningkatnya kebutuhan konsumsi ikan dan melimpahnya ketersediaan ikan di laut mendorong produksi perikanan yang dihasilkan Jawa Timur.

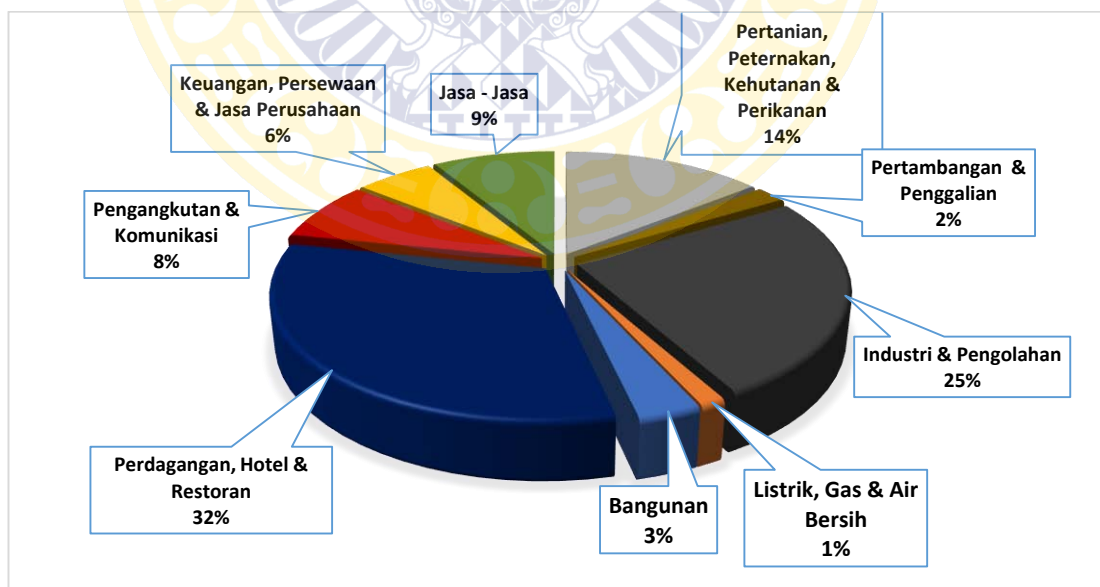


Sumber : Badan Pusat Statistik 2014

Gambar 1.3
Produksi Subsektor Perikanan Menurut Provinsi
2004 – 2013

Infrastruktur menjadi salah satu kunci keberhasilan Jawa Timur mengelola sumberdaya lautnya. Hingga tahun 2010 jumlah unit pengolahan ikan (UPI) yang tersebar di seluruh Jawa Timur mencapai 10.640 unit (KKP, 2012). Sebagian besar didominasi usaha berskala kecil dan menengah. Selain itu, Jawa Timur juga memiliki sarana penunjang transportasi laut berupa pelabuhan. Pelabuhan Tanjung Perak merupakan pelabuhan terpenting sekaligus menjadi pintu masuk jalur lintas perdagangan dalam dan luar negeri yang dapat menunjang kegiatan lalu lintas pelayaran melalui jalur laut. Saat ini sedikitnya terdapat 13 jalur pelayaran internasional dan 29 rute pelayaran domestik dari dan ke Pelabuhan Tanjung Perak.

Salah satu faktor kemajuan perekonomian Jawa Timur juga disebabkan adanya pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder atau tersier. Diantara sektor – sektor ekonomi yang ada, sektor industri dan perdagangan menjadi penopang terbesar dari ekonomi Jawa Timur.



Sumber: Badan Pusat Statistik 2014, *diolah*

Gambar 1.4

Komposisi PDRB Jawa Timur Rata - rata Menurut Sektor Tahun 2009 – 2013

Komposisi perekonomian Jawa Timur didominasi oleh sektor perdagangan, hotel & restoran dengan sumbangan kontribusi terbanyak sebesar 32% dan sektor industri pengolahan sebesar 25%. Jika dicermati, kedua sektor tersebut menopang lebih dari 50% PDRB Jawa Timur. Sebaliknya, pada sektor primer (pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan) kontribusi yang didapat hanya sebesar 14%.

Aktivitas kelautan di Jawa Timur tersebar baik di sektor primer, sekunder maupun tersier. Sebagai contoh, di sektor primer terdapat sektor perikanan yang dapat menjadi komoditas bagi perekonomian Jawa Timur. Pada sektor sekunder dan tersier terdapat beberapa sektor potensial untuk menggerakkan ekonomi Jawa Timur seperti industri pengolahan ikan di Sidoarjo, industri galangan kapal di Bojonegoro dan Lamongan, tambak dan penggalian garam di Pulau Madura.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu melakukan perencanaan program – program strategis agar pembangunan kelautan di daerah dapat menggerakkan sektor–sektor perekonomian yang ada. Melalui pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan keterkaitan antar sektor ekonomi baik daratan atau lautan, pemerintah ingin menjadikan kelautan sebagai *leading sector* dalam pembangunan nasional (KKP, 2012). Di samping itu, sektor kelautan diharapkan dapat memberikan dampak pengganda (*multiplier effect*) terhadap *output*, penyerapan tenaga kerja dan pendapatan terhadap sektor – sektor ekonomi yang lain.

Selanjutnya dibutuhkan metode analisis yang tepat dan komprehensif guna menganalisis keterkaitan antar sektor dan menentukan sektor potensial bagi pembangunan dengan menggunakan metode *Input-Output*. Metode ini dapat

menganalisis keterkaitan ke depan (*forward linkage*) yaitu *output* suatu sektor yang digunakan sebagai *input* oleh sektor lain dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dimana kaitannya dengan penyediaan bahan baku/*input* dari suatu sektor. Analisis *Input-Output* juga didasarkan pada situasi perekonomian yang nyata serta dapat mengetahui arus transaksi pelaku perekonomian pada sektor kelautan.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran sektor kelautan dalam perekonomian Jawa Timur ?
2. Bagaimana tingkat keterkaitan ke belakang dan ke depan sektor kelautan dalam perekonomian Jawa Timur ?
3. Bagaimana dampak pengali sektor kelautan dalam perekonomian Jawa Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan menganalisa peran sektor kelautan dalam perekonomian Jawa Timur
2. Mengetahui dan menganalisa tingkat keterkaitan dan ke depan sektor sektor kelautan dalam perekonomian Jawa Timur
3. Mengetahui dan menganalisa dampak pengali sektor kelautan dalam perekonomian Jawa Timur

1.4. Manfaat Penelitian

1. Mengintegrasikan berbagai upaya pengembangan sektor kelautan dengan berbagai pihak baik di tingkat nasional maupun daerah.
2. Dapat meramalkan tingkat kemakmuran dan pertumbuhan perekonomian yang dapat dilihat dari peningkatan permintaan akhir dari suatu sektor.
3. Sebagai dasar dalam perancangan program – program perencanaan pembangunan di provinsi Jawa Timur khususnya pada sektor kelautan

1.5. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penelitian skripsi ini terbagi dalam lima bab yang saling berkaitan dan sesuai dengan judul penelitian. Adapun kerangka penulisan ini masing-masing bab terdiri sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan teori dan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan penelitian. Di samping itu, pada bagian ini dijelaskan pula hipotesis serta model yang akan digunakan dan kerangka pemikiran.

BAB 3 : METODE PENELITIAN

Metode penelitian memuat pendekatan penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan serta teknik analisis.

BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan gambaran umum variabel-variabel penelitian, analisis model dan pembahasan mengenai peran, keterkaitan dan dampak pada sektor kelautan di Jawa Timur

BAB 5 : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini memuat simpulan hasil penelitian dan saran berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**